



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WIDYASTUTI PURBANI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 633926

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.536.980.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 464 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 1162 m<sup>2</sup> di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 336.980.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 192.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. LAINNYA, (---)MESIN GENERATOR LISTRIK FIRMAN 4200 VA FIRMAN 4200 VA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
6. MOBIL, OPEL MINIBUS Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 310.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.043.980.000

**III. HUTANG** Rp. 150.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.893.980.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.